

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA)  
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH  
DI DESA TENGGANAU KECAMATAN PINGGIR  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**Oleh**

**ELA SAPUTRI**  
**NPM. 167110158**

**ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ela Saputri  
NPM : 167110158  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul skripsi : Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 04 Desember 2020  
Turut menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Drs.Parjiyana,M.Si

Ketua

Lilis Suryani,S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ela Saputri  
NPM : 167110158  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul skripsi : Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim pengujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Ketua  

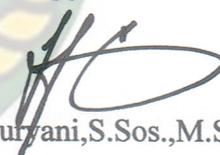

Drs. Parjiyana, M.Si

Sekretaris



Rosmita, S.Sos., M.Si

Anggota



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si



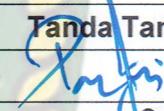
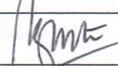
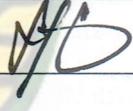
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1172/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 November 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ela Saputri  
NPM : 167110158  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**  
Nilai Ujian : Angka : " 78 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si	Ketua	1. 
2.	Rosmita, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 19 November 2020  
An. Dekan,

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1172/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ela Saputri  
N P M : 167110158  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Struktur Tim :

1. Drs. Parjiyana, M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji  
2. Rosmita, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 November 2020  
Dekan.

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ela Saputri  
NPM : 167110158  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul skripsi : Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan di nilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

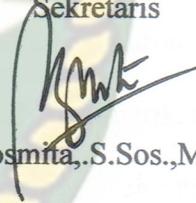
Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Ketua



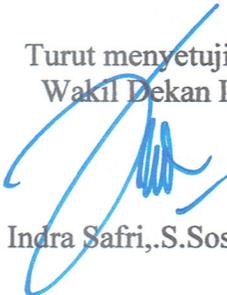
Drs. Parjiyana, M.Si

Sekretaris



Rosmita, S.Sos., M.Si

Turut menyetujui  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Prodi Ilmu Administrasi Publik



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”**.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang setiap saat sabar dalam memberikan pengertian sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, juga terhadap orang tua saya yang setiap saat memberikan dorongan demi terselesainya skripsi ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.,MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang menyediakan fasilitas

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.

3. Bpk.Drs. parjiyana., M.Si bertindak sebagai Dosen Pembimbing 1 yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lali dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahanda Wagiman dan Ibunda Suriyani yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang tiada tara kepada saya.
5. Kepada Mas Johan, terima kasih telah memberi saya nasehat-nasehat dan dukungan secara moril dan meteril selama ini. selanjutnya kepada kedua adik saya Eka Pranciska, dan Egi Prayoga terima kasih memberikan saya semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat menulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.

8. Terima kasih kepada Kantor Desa Tenganau yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Administrasi publik. Khususnya kepada Titin, Nana, Aswani, Wita, Dewi, Friska, Rio, Triya, Mentari. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Dina Safitri yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan selama ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, November 2020

Penulis,

**Ela Saputri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR.....</b>	<b>21</b>
A. Studi Kepustakaan .....	21
1. Konsep Adminitrasi .....	21
2. Konsep Organisasi .....	26
3. Manajemen .....	30
4. Konsep Pembangunan .....	33
5. Konsep Kemiskinan .....	33
6. Indikator Keberhasilan Rastra .....	33
7. Konsep Pelaksanaan .....	34
8. Konsep Pelaksanaan Kebijakan .....	38
B. Kerangka Pemikiran.....	42
C. Hipotesis.....	42
D. Konsep Operasional .....	43
E. Operasional variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran .....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Jenis Dan Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	55
B. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	57
1. Visi Kabupaten Bengkalis.....	57
2. Misi Kabupaten Bengkalis.....	57
C. Gambaran Umum Kecamatan Pinggir.....	58
1. Letak Geografis.....	59
2. Kondisi Geografis.....	60
3. Keadaan Penduduk Serta Perkembangannya.....	61
4. Ekonomi dan Pendidikan.....	62
D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	63
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosia Kabupaten Bengkalis.....	63

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden.....	72
1. Jenis Kelamin Responden.....	72
2. Tingkat Pendidikan.....	73
3. Tingkat Umur Responden.....	73
B. Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis.....	74
1. Tepat Sasaran.....	77
2. Tepat Jumlah.....	81
3. Tepat Harga.....	85
4. Tepat Waktu.....	88
5. Tepat Kualitas.....	92
6. Tepat Administrasi.....	95
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis.....	101

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

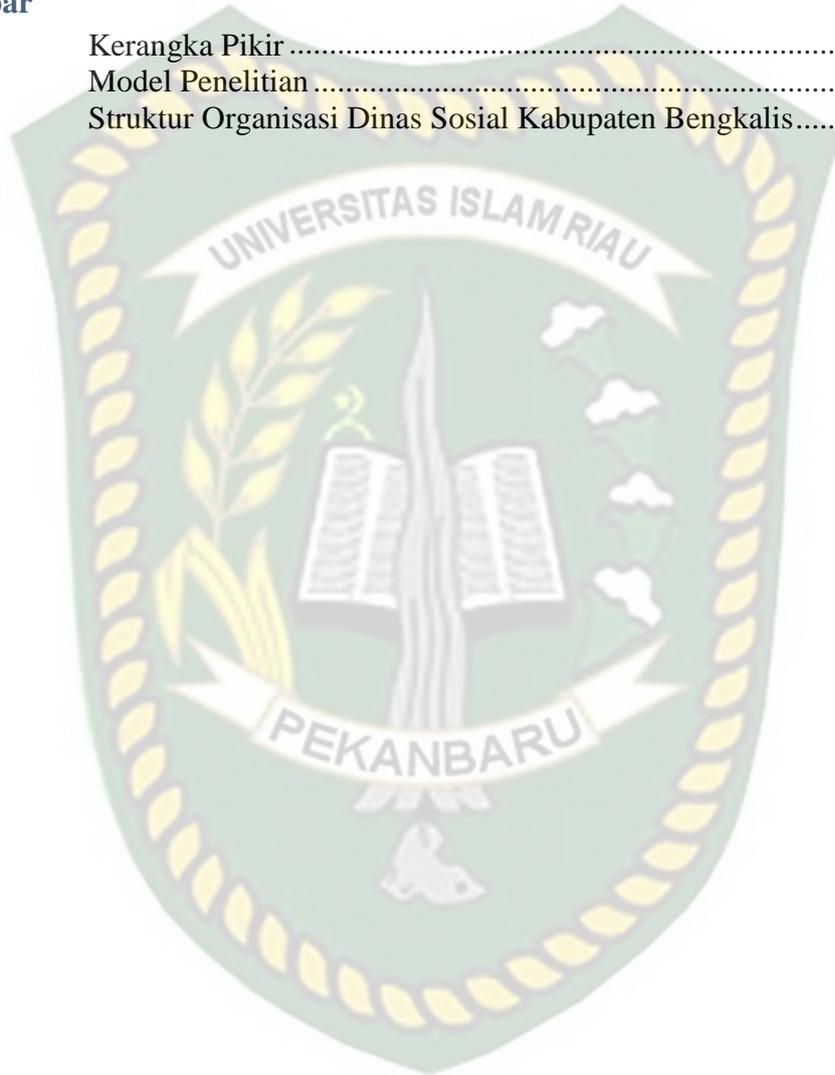
**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Table</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Standar Operasional Prosedur Distribusi Rastra Kabupaten Bengkalis .....	12
I.2	Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan Penerimaan Rastra di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	15
II.1	Operasional Variabel.....	44
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	50
IV.1	Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir .....	60
V.1	Jenis Kelamin Responden .....	72
V.2	Tingkat Pendidikan Responden .....	73
V.3	Tingkat Umur Responden .....	74
V.4	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Sasaran .....	78
V.5	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Jumlah.....	81
V.6	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Harga.....	85
V.7	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Waktu.....	89
V.8	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Kualitas .....	92
V.9	Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Tepat Adminitrasi .....	96
V.10	Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Tentang Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	99

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
II.1	Kerangka Pikir .....	42
III.1	Model Penelitian .....	54
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
- Lampiran 2. Wawancara untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
- Lampiran 3. Wawancara untuk Pendamping Sosial Rastra
- Lampiran 4. Kuesioner untuk Masyarakat
- Lampiran 5. Tabulasi Data Jawaban Masyarakat
- Lampiran 6. Dokumentasi



### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi Usulan Penelitian yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ela Saputri**  
NPM : **167110158**  
Program Studi : **Administrasi Publik**  
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**  
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2020

  
Ela Saputri

**PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI DESA TENGGANAU  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

Ela Saputri

Kata Kunci: Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA);

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variable yang ada pada objek penelitian ini. Berdasarkan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaksakan tugasnya menggunakan indikator-indikator ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan Adminitrasi Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra), masih adanya keluhan dari masyarakat mengenai Subsidi Beras Sejahtera (Rastra). Penghambat dalam pelaksanaan ini adalah pendistribusian Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Kurang konsistensi dalam penyaluran Rastra serta Kurangnya sumberdaya yang belum memadai.

**IMPLEMENTATION OF PROSPEROUS RICE SUBSIDIES (RASTRA)  
FOR LOW INCOME COMMUNITIES IN TENGGANAU VILLAGE,  
PINGGIR DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT**

**ABSTRACT**

Ela Saputri

Keywords: Prosperous Rice Subsidy (RASTRA);

This study aims to determine the implementation of Prosperous Rice Subsidies (Rastra) for Low-Income Communities in an effort to improve the welfare of the community in Tenggana Village, Pinggir District, Bengkalis Regency and to determine the inhibiting factors for the Implementation of Prosperous Rice Subsidy (Rastra) for Low-Income Communities in an effort to improve the welfare of the community in Tenggana Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. Data analysis in this study is to use quantitative methods with descriptive analysis techniques, namely describing and summarizing the conditions of the situation variables that exist in the object of this study. Based on the data discussed in the previous chapter the Bengkalis Regency Social Service carried out its duties using indicators of target accuracy, quantity, price, time, quality and Administration of the Implementation of Prosperous Rice Subsidies (Rastra), there are still complaints from the public regarding Prosperous Rice Subsidies (Rastra) . Obstacles in this implementation are the distribution of Rastra to low-income communities in Tenggana Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Lack of consistency in the distribution of Rastra and a lack of inadequate resources.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan yaitu bidang ekonomi. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan oleh suatu Negara yang merdeka untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya (Noer, 1995:2). Pada hakekatnya Negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan jenis kelamin.

Dalam undang-undang dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Badan Pusat Statistik. 2018) Di Indonesia saat ini terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh atau acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat (Tahir, 2015:21). Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. (Budiharsono, 2001:27)

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulangnya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan (Mudrajad, 1997:12). Berbicara mengenai kemiskinan, secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta benda”. Dalam artian yang luas kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. (Suparlan, 1995:23)

Sama-sama kita lihat bahwa kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu global, artinya kemiskinan tidak hanya menjadi pokok masalah di Negara dunia ketiga, tetapi juga menjadi persoalan dinegara maju. Hampir disemua Negara berkembang, sebagian penduduk tidak bisa menikmati hasil pembangunan, mayoritas penduduk hidup melarat. Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin, sebaliknya malah membuat mereka semakin sengsara. (Sugiarti, 2014:48) Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. upaya bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa Program Raskin, dimana Raskin telah berganti nama menjadi Rastra, dan bantuan lain-lainnya. (Romli, 2017:23)

Program seperti ini sebenarnya sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun,

baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Rastra).

Namun saat ini program Raskin (Beras Miskin) telah berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera). Pergantian nama ini dilakukan oleh pemerintah guna merubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat yang miskin, melainkan mengurangi beban pengeluaran serta mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi.

Penyaluran rastra ini merujuk pada Surat Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 Dengan Perihal Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Penetapan anggaran subsidi beras yang merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota diseluruh indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam Negeri.

Selain itu Perum Bulog menjelaskan bahwa “Beras Sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskreditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih

sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya, tetapi kualitas yang sampai kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran) harus jauh lebih baik dan terjamin.

Program Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat Sampai Dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kementrian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian Rastra.

Penentuan kriteria penerima adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra. Manfaat Rastra seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. (Hikmah, 2017:12)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti program rastra. Dimana program rastra ialah program subsidi beras yang berfungsi memenuhi perlindungan sosial dan kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat Indonesia. Program ini juga mampu menurunkan angka kemiskinan baik di desa maupun di kota. Kebijakan program rastra juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan prioritasnya kedaulatan pangan. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran citra ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan

perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari intruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus pada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Seperti yang terdapat di dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang “Kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah”. Yang didalamnya terdapat bantuan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang pangan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (Rumah Tangga Miskin).

Peraturan Menteri No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Rastra bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan rastra kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kementerian coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial, dimana kebijakan program Rastra termasuk didalamnya.

Perundang-undangan yang menjadi dasar untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan program peraturan Rastra tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDUM Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;**
- 2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;**
- 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 Tentang Penepatan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat;**
- 4. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum “Bantuan Sosial Beras Sejahtera”;**

Kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PKM) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial, dimana kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.

Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Rastra merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program rastra termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Program rastra merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/ Kelurahan Pemerintahan Setingkat adalah “Kepala desa/lurah pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan pangan. Terkait program bansos rastra, kepala desa/lurah pemerintah setingkat membentuk pelaksanaan distribusi bansos rastra sebagai berikut.

1. Kedudukan

Pelaksanaan distribusi bansos rastra berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepala desa/lurah pemerintah setingkat.

2. Tugas

Pelaksanaan distribusi bansos rastra mempunyai tugas/berkoordinasi dengan perum bulog, memeriksa kualitas dan kuantitas bansos rastra yang diserahkan oleh perum bulog di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan bansos rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran bansos rastra.

3. Fungsi

Pelaksanaan distribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan perum bulog terkait pelaksanaan penyaluran bansos rastra.
- b. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bansos rastra yang diterima dari perum bulog di Titik Distribusi (TD).
- c. Sosialisasi bansos rastra kepada amsyarakat khususnya KPM.
- d. Penyaluran bansos rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun.

- e. Penyelesaian administrasi pelaksanaan/penyaluran bansos rastra, antara lain: penyediaan DPM15 untuk penyaluran bansos rastra, penandatanganan berita acara serah terima (B1ST) di Titik Distribusi, dan membuat datar realisasi penyaluran beras bansos rastra.
- f. Melaporkan dokumen administrasi yang tersebut pada butir (e) yang merujuk pada mekanisme pelaksanaan.

Adapun mekanisme pelaksanaan Bansos Ratra sebagai berikut:

**a. Pembuatan panduan pelaksanaan Bansos Rastra**

Dalam pelaksanaan program bansos rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi pedoman berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari pedoman umum Bansos Rastra, Petunjuk Teknis Bansos Rastra dan pedoman khusus terkait Bansos Rastra.

**1. Penyusunan Pedoman Umum Bansos Rastra**

Pedoman umum bansos rastra adalah panduan pelaksanaan bansos rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementrian/Lembaga baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Peum ini membuat kebijakan yang mengatur pelaksanaan program Bansos Rastra yang berlaku secara nasional. Pedum Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

## 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Bansos Rastra

Berdasarkan pedoman umum bansos rastra, pejabat iselon 8 dikementerian sosial yang bertanggung jawab terhadap program Bansos rastra menyusun dan menetapkan petunjuk teknis bansos rastra sesuai Pasal 41 dalam peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.O5/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Negara.

Isi dari Petunjuk Teknis Bansos Rastra mengacu pada Pasal 42 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Menteri Keuangan No.254/PMK/2015 tentang belanja Bantuan Soaial pada Kementrian/Lembaga Negara dan Pasal 43 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian/Lembaga Negara.

### a) Penyusunan Pedoman Khusus Terkait Bansos Rastra

Pedoman khusus terkait program bansos rastra disusun oleh Kelurahan/Lembaga tertentu sebagai panduan pelaksanaan kebijakan yang emnjadi tanggung jawab Kelurahan/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan/Lembaga tersebut, seperti pedoman khusus pengelolaan pengaduan Bantuan Sosial Pangan yang diterbitkan oleh kementerian dalam negeri.Pedoman khusu dimaksud mengacu pada pedoman umum bansos rastra dan ditinjau ulang untuk

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. (Afrianto, 2016:12)

**b. Penerima Manfaat Bansos Rastra**

1. Penerima manfaat Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial.
2. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.
3. DT-PPFM dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut Pokja data yang dibentuk melalui surat keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 september 2016 yang diperbarui melalui surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja data terdiri dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kementerian PPN/Bappenas, kementerian dalam Negeri, kementerian sosial, badan pusat statistik (BPS), dan secretariat Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNPPK).
4. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Untuk setiap KPM, daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. Nama pasanagn kepala keluarga/pengurus keluarga;
  - b. Nama kepala keluarga;
  - c. Nama anggota keluarga lainnya;
  - d. Alamat tempat tinggal;
  - e. Kode unik keluarga dalam DT-PPFM.

Rastra bertujuan untuk mengurangi pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Kabupaten bengkalis di tahun 2018 mendapatkan beras sejahtera (Rastra) dari pemerinath pusat sebanyak 20.219 kartu keluarga dengan ukuran yang diterima sebanyak 10 kg perbulan selama satu tahun. Dulu pemerintah memberikan 15 kg waktu masa Raskin, pada raskin tersebut pemerintah harus membayar 1.600/perkilo sebanyak 15 kg/bulan/KK. Harga perkilo yang seharusnya Rp. 1.600 tersebut disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga sekarang masyarakat tidak dipungut biaya apapun dalam pengambilan beras sejahtera di kantor desa, tetapi dengan catatan mereka hanya mendapat 10 kg/bulannya. Berikut ini Standar Operasional Prosedur Distribusi Rastra di Kabupaten Bengkalis:

**Tabel I.2**  
**Standar Operasional Prosedur Distribusi Rastra Kabupaten**  
**Bengkalis**

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan	persyaratan/kelengkapan	Waktu berdasar kan Sop	Waktu berdasarkan pelaksanaan	Output
1	Menyusun surat permohonan alokasi Rastra	Timk or	Data RTS-PM Rastra per-desa	2 jam	4 jam	Tersusun surat permohonan alokasi Rastra

2	Pengesahan surat permohonan alokasi Rastra	Kasi bantuan FM dan benca na Kadin sos, Ketua tim Rastra	Surat permohonan alokasi Rastra	2 jam	4 jam	Surat permohonan alokasi Rastra ditanda tangani dan diberi nomor agenda
3	Penyampaian surat permohonan alokasi Rastra ke Bulog dan Tim Rastra Provinsi	Timkor	Surat permohonan alokasi Rastra	1 hari	1 minggu	SPA terkirim ke Bulog Divre Bengaklis dan Tim Rastra provinsi.
4	Penyusunan jadwal distribusi Rastra dengan Bulog dan Tim koordinasi Rastra	Kasi bantuan FM dan benca na	Data RTS-PM Rastra per-desa	1 hari	2 hari	Tersusun jadwal distribusi Rastra per-desa
5	Pengesahan jadwal distribusi	Kadin sos	Jadwal distribusi Rastra tersusun	1 hari	2 hari	Jadwal tersusun disahkan
6	Penggandaan jadwal distribusi	Timkor	Jadwal distribusi Rastra tersusun	1 hari	1 hari	Jadwal distribusi yang telah disahkan digandakan dan disampaikan ke masing-masing Uraian prosedur masing kecamatan

7	Monitoring distribusi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana	Jadwal distribusi, data RTS, kendaraan Dinas	Sesuai jadwal	-	Pendistribusian Rastra berlangsung sesuai jadwal dan sesuai pedoman umum Rastra, pembayaran harga tebus beras tepat sasaran
8	Rapat koordinasi evaluasi distribusi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana	Laporan distribusi Rastra Kecamatan, hasil monev, hasil Rakor evaluasi distribusi	1 hari	1 hari	Terlapor permasalahan distribusi bulan itu dan terselesaikannya permasalahan
9	Pelaporan pelaksana distribusi Rastra	Timkor	Laporan distribusi Rastra Kecamatan, hasil monev, hasil Rakor evaluasi distribusi	3 hari	4 hari	Tersusunnya laporan distribusi Rastra bulan itu
10	Pengiriman laporan distribusi Rastra	Timkor	Laporan distribusi Rastra	1 hari	2 hari	Laporan distribusi Rastra tersampaikan ke tim Rastra Bengkalis dan bulog Divre Bengkalis

Sumber : Dinsos Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

Saat ini rastra tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), namun biaya transportasinya saja yang disubsidi oleh pemerintahan daerah. Dalam artian, pemerinath juga tetap konsen dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.

Dari data yang saya dapat di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis khususnya Desa Tenganau, Penerima MANFAAT-1 Bansos Rastra pada tahun 2018 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Khususnya Desa Tenganau ada 133 jiwa yang mendapatkan beras sejahtera tersebut.

Adapun tingkat kesejahteraan Keluarga di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel I.2**  
**Tingkat kesejahteraan keluarga dan penerimaan rastra di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dalam KK	Jumlah Penerima Rastra
1.	Keluarga pra sejahtera	142 KK	129
2.	Keluarga Sejahtera 1	111 KK	3
3.	Keluarga Sejahtera 2	27 KK	1
4.	Keluarga Sejahtera 3	22 KK	-
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	8 KK	-
Jumlah Total		310 KK	133

*Sumber: Kantor Kepala DesaTenganau 2018.*

Dari tabel 1 diatas menjelaskan bahwa Desa Desa Tenganau memiliki 310 KK dan kesejahteraan keluarga Desa Desa Tenganau pada umumnya berada pada tingkat keluarga pra sejahtera, yakni sebanyak 140 KK yang berada pada keluarga pra sejahtera dan berhak mendapatkan bantuan beras sejahtera. Kemudian keluarga sejahtera 8 plus hanya 8 KK.

Dalam pelaksanaan program bansos rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi pedoman berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintah setingkat, maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program bansos rastra. Panduan pelaksanaan program bansos rastra terdiri dari pedoman umum bansos Rastra, petunjuk teknis bansos rastra dan pedoman umum khusus terkait bansos rastra.

Penyusunan pedoman umum bansos rastra pedoman umum bansos rastra adalah panduan pelaksanaan bansos rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai kementerian/lembaga, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini memuat kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program bansos rastra yang berlaku secara nasional. Pedum rastra disusun oleh tim koordinasi rastra pusat dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM bansos Rastra disampaikan oleh kementerian sosial kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota (Tim koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim koordinasi Bansos Pangan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program rastra. Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternative pemecahannya.

Dalam pelaksanaan penyaluran program rastra agar sampai ke titik pendistribusian maka kementerian sosial memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran bantuan Rastra sampai ke titik pendistribusian. Dan setiap bulannya kementerian sosial menerbitkan surat perintah penyaluran kepada perum Bulog untuk penyaluran beras sejahtera tersebut, karena perum Bulog bertanggung jawab menyalurkan rastra sampai ke titik distribusi.

Beras sejahtera disalurkan oleh perum bulog dalam kemasan berlogo PERUM BULOG sesuai ketentuan kementerian sosial. Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Sebelum pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra ke titik distribusi, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas oleh tim koordinasi bansos pangan. Pada prinsipnya waktu penyaluran rastra dilakukan setiap bulan. Dalam hal penyaluran bansos rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap bulan karena kebijakan daerah atau kendala yang terjadi seperti hambatan transportasi, kendala iklim dan lain sebagainya. Maka tim koordinasi bantuan pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran bansos rastra kepada kementerian sosial.

Penyaluran bansos rastra dari titik distribusi (TD) ke titik bagi (TB) keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyaluran bansos rastra kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan oleh pelaksana distribusi dengan menyerahkan bansos rastra sejumlah 10 kg setiap bulan. Dalam pelaksanaannya, Rastra harus mengacu

pada indikator keberhasilan tersebut, yakni Rastra yang pertama, harus tepat sasaran. Maksudnya penerima rastra harus benar-bener yang layak untuk mendapatkan program tersebut. Yang kedua, kualitas beras yang didistribusikan haruslah yang layak di konsumsi tidak berbau, berkutu, dan pecah-pecah.

Namun berbanding terbalik dengan yang terjadi di Di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masih terdapat beberapa masalah khususnya dalam pelaksanaan pendistribusian rastra. Yaitu terjadinya ketidak merataan. Ketidak merataan disini masih ada masyarakat yang layak mendapatkan beras tersebut tapi malah tidak mendapatkan. Kebalikan dari itu ada masyarakat yang mampu atau masyarakat kalangan atas yang mendapatkan bantuan Rastra. Terlihat jelas disini bahwa dari sistem pendataan yang dilakukan oleh petugas kantor desa tersebut kurang teliti, buktinya saja masih ada masyarakat yang kalangan bawah tidak mendapatkan rastratersebut. Dan kualitas beras yang didistribusikan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak berkualitas baik, seperti berasnya berbau, berkutu dan pecah-pecah.

Berdasarkan latar belakang diatas penullis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Masih adanya ketidak merataan dalam pelaksanaan pendistribusian Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah Di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Rastra yang disalurkan untuk masyarakat berpendapatan rendah Di Desa Tenganau tidak berkualitas baik, seperti berbau apek, berkutu dan pecah-pecah.

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang bahwa Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”?**

## C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik itu dari sudut pandang teoritis/akademis beserta kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dan Akademis

Dari kegunaan teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan sebuah aturan yang ingin diimplementasikan serta dapat menjadi bahan masukan mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kaneh penelitian yang berbedah dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat, guna meningkatkan program rastra kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain:

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi melalui kerja sama antar personal yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga tertentu.

Definisi Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2003;2), administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu

organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam Zulkifli (2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Zulkifli (2005:20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrument tersebut berwujud sejumlah unsur

yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. Menurut Wirman Syafri (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli, 2005:71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisien yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau menejer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggung jawab, baik bagi yang member maupun yang menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak di dalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.
6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (*organisasi*) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.

7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggung jawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (*top manager*). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, atau dipusatkan.
9. Skala hierarki (*scala chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangot kerja ddi dukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Menurut John A. Vieg dalam Frit Morstein Max (1959) menyebutkan bahwa “dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk maksud yang disadari” (Dalam Wirman, 2012;8)

Menurut Atmosudirdjo (Dalam Zulkifli, 2009;10) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.

2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan status yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber pendanaannya ( financial resources), serta langkah-langkah yang akan di tempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Menurut Leonard D. White mengatakan bahwa administrasi ialah proses yang selalu terdapat setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut: administrasi adalah proses (rangkaiian kegiatan) dan proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok (dalam wirman syafri, 2012;9).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafril, 2012;14), administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam persfektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut sebagai berikut:

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansia (tata keuangan)
7. Material (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Pemerintah menjalankan tugas kerjasama untuk mancapai sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan, jadi dalam hal ini perlu administrasi yang dimaksud atas pemerintah dan masyarakat.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi sebagai wadah sekumpulan manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2003,6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /keompok orang yang disebut bawahan. Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Konsep organisasi (organization) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan menegerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. (Zulkifli, 2009;15)

Menurut Zulkifli and Nurmasari (2015;99) organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Organisasi dalam arti badan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat ,dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Zulkifli and Nurmasari (2015;99) Unsur-Unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu:

1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat di pandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti yang dikemukakan siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Menurut Zulkiifli (2005;131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin mengindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang dating dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan di akhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan poses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009:16). Yaitu organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang

membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Seperti halnya administrasi, organisasi juga merupakan salah satu fenomena social masyarakat modern. Melalui organisasi, orang dapat memenuhi dan mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Oleh karena itu, akan dijumpai beragam prinsip yang mereka pegang dalam memanfaatkan organisasi sebagai alternative alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009;39) merumuskan prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (efforts) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. Prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (unity of command) dan kesatuan arah gerak (unity of direction).
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homegan. Untuk terarahnya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya (inisiatif) dari seluruh personil organisasi. Oleh karena itu seluruh pekerjaan harus terbagi habis menjadi keveling-keveling kerja, dan dijaga sampai ada batas-batas kaveling kerja yang tidak jelas atau tegas.
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan beratnya tugas. Demikian pula, maka luas beratnya kekuasaan yang diberikan harus sesuai dengan luas dan beratnya tanggung jawabnya. Bila prinsip ini dilanggar, maka pasti akan terjadi berbagai perbincangan dalam berbagai macam bentuk.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan jelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tugas dan jelas batas-batasnya. Pedelegasian tugas dan wewenang atau kekuasaan harus jelas bagi kedua belah pihak-pihak pendelegasian dan penerima delegasi. Pelimppihan tugas dan wewenang sedapat mungkin tertulis dan dirumuskan dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, menunjukkan isi materinya, dan batas-batasnya yang tegas, bilamana tidak memungkinkan tegas, maka harus disertai suatu "policy" yang memberikan pedoman untuk menilai kasus-kasus praktek.
5. Kesatuan komando atau hirarkhi (the one man one chief principle). Penyusuanna organisasi harus mengikuti garis-garis tatahubungan

- bawahan atas. Semua harus komando, perintah, laporan, informasi, kerja, penfasilitasan kerja dan sebagainya, harus melalui garis-garis hirarkhi ini sebagai prinsip. Didalam praktek prinsip ini harus dipegang teguh, akan tetapi tidak boleh kaku, agar supaya tidak macet.
6. Komunikasi. Kelompok organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antar sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan. Kelancaran harus dan ketepatan data dan informasi yang relevan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
  7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional. Artinya merupakan bagian integral dari pada kehidupan organisasi. Dengan demikian tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol segala-galanya, malahan yang demikian itu mendatangkan efek yang tidak baik terdapat motivasi kerja bawahan.
  8. Kontinuitas, artinya pekerjaan tidak boleh mandeg (terhenti) karena seorang berhalangan. Oleh karena itu untuk bidang kerja yang sifatnya rutinitas sebaiknya ditunjuk seorang untuk beberapa orang sebagai pelaksana jika personil yang telah ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab kerja bersangkutan berhalangan.
  9. Saling asuh antara instansi line dan staf. Hal ini penting sekali terutama didalam organisasi yang sudah mulai kompleks operasinya. Yang harus dicegah adalah jangan sampai, karena berbagai hal atau sebab, suatu unit kerja merasa lebih penting atau dipentingkan diatas unit kerja lainnya.
  10. Koordinasi. Prinsip ini adalah pelengkap prinsip kedua diatas, pembagian kerja menimbulkan spesialisasi, spesialisasi mempercepat peningkatan keahlian, akan tetapi mengandung bahaya desintegrasi. Untuk itu penunjukkan pelaksanaan masing-masing bidang tugas terjamin untuk bisa bekerja berdampingan. Kebijakan yang dapat mengembangkan koordinasi antara lain adalah kewajiban bertukar informasi dan bertukar pikiran setiap kali timbul masalah-masalah bersama, dan menanamkan kebiasaan untuk saling berkonsultasi satu sama lain bila menghadapi pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan unit organisasi lainnya.
  11. Kehayatan, setiap personil harus memandang organisasi seolah-olah hidup (berhayat). Artinya, jika terjadi hal-hal yang membahayakan hayat organisasi, maka segera timbul inisiatif (prakarsa) spontan dari para personil untuk bertindak dan mengamankan organisasi dari bahaya dimaksud.
  12. Tahu diri pada setiap warga organisasi. Prinsip ini berhubungan dengan disiplin dan prinsip pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Setiap personil organisasi harus cukup sadar dan tahu akan posisinya didalam hirarki organisasi. Walaupun kita kadang-kadang gelisah melihat rekan-rekan melakukan hal-hal yang melanggar

prinsip-prinsip organisasi, bahkan atasan sendiri kadang-kadang yang melakukan pelanggaran.

### 3. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015;14) manajemen adalah pencapaian tujuan atau saranan yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain, jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama dan yang melakukan kerja sama adalah manusia. (dalam Zulkifli,2015;5;14)

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan organisasi, yang bisa dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksentensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim.
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan pada pekerjaan dan para manejer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Menurut Sondang P. Siagian (2003;5), manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang

yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut George R. Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (Dalam Doni J. Priansa dan Agus Garnida, 2013;29)

Menurut Stoner, et.al (1996;7) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti yang telah dikemukakan Siagian (2003:5) manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pengetahuan manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi dilakukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat dipelajari. Peter Drucker mengemukakan dua hal penting terkait dengan manajemen yaitu fungsi manajemen dan orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu kedudukan sosial dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu disiplin dan bidang telaah. (dalam Doni J. Priansa dan Agus Garnida, 2013:30)

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan mendayagunakannya untuk mencapai tujuan. George R. Terry (dalam D. J. Prinsa dan Agus Garnida, 2013;33) menyebut unsur manajemen dengan istilah “6M”, unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. “6M” tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja (*Men*)  
Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif.
2. Dana (*Money*)  
Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Metode (*Methods*)  
Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. Material (*materials*)  
Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
5. Mesin (*machines*)  
Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Pasar (*Market*)  
Pasar untuk menjual hasil.

#### **4. Konsep Pembangunan**

Menurut Sondang P. Siagian administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara/ bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

#### **5. Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas juga kerap

didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan dan keadaan kesehatan yang buruk. Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti yang diterapkan oleh departemen sosial, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Menurut Suparlan arti kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

### **3. Indikator Keberhasilan Rastra**

Menurut Pedum Rastra (dalam Hastuti dkk, 2012), menyatakan bahwa implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat) Tepat sasaran penerima, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Secara singkat, pengertian indikator kinerja 6T tersebut meliputi:

- a. Tepat sasaran penerima manfaat: Rastra hanya diberikan kepada RTS-P yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Rastra (DPM-1) hasil verifikasi data PPLS 2008 BPS melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh camat.
- b. Tepat jumlah: jumlah beras Rastra yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun.
- c. Tepat harga: harga tebus Rastra adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik distribusi.

- d. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
- f. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

#### 4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Usman, 2002:70)

Mengingat definisi dan makna dan sifat pelaksanaan/implementasi yang dapat dipahami dan diartikan dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikannya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan dapat berupa proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Lester dan Stewart (2000), pelaksanaan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif .

Menurut James Anderson (1979), menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada saat ini. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Implementasi atau kebijakan dipahami juga sebagai berikut, dalam Kusumanegara (2000: 98:99):

- a. Proses yaitu karena didalamnya terjadi beberapa aktifitas berkelanjutan
- b. Output yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.
- c. Outcome yaitu akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan program, yaitu apakah pelaksanaan suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diusahakannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknya pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Dalam Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis, 2015;51)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), mengidentifikasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Dalam Leo Agustino, 2014;139)

Pressman dan Wildavsky (1978: xxi) mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”.

Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Sedangkan menurut Matland menyatakan bahwa literature mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) kelompok dengan top-down melihat perancang kebijakan sebagai actor sentral dalam implementasi kebijakan. Selain itu kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya pada tingkat sentral atau variable yang bersifat makro. (dalam Hamdi, 2012;98)

Bottom-up menekankan pada dua hal yakni kelompok sasaran dan pemberi pelayanan. Pemberian tekanan pada dua hal tersebut menurut bottom-up didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat local.

Menurut Matland (1995:153) mengembangkan suatu model kontingensi, yang disebutnya sebagai model ambiguitas. Dari keseluruhan paparan terdahulu memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan yang berisi upaya untuk merubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan atau ditetapkan yang secara rinci dan berjenjang dan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan pemahaman tersebut.

Menurut Abdullah Syukur (1987:398) Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakandengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain di atas dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## **5. Konsep Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya (Anggara, 2014:12). Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses

memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan (Eddy Wibowo, 2005:70).

Untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implemmentasi yaitu, 1. Adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, 2. Target group, 3. Unsur pelaksana (Abdullah M. Syukur, 1986:396). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel, yaitu 1. Karakteristik dari masalah, 2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang, 3. Variabel lingkungan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi dimasyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti pelaksanaan tidak efektif. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Bambang Sugono, yaitu: “Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian perilaku atau perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif”. (AG. Subarsono, 2005:70).

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah Model Grindle. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Adapun content atau isi dari sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dipengaruhi oleh faktor yang mencakup: (Samodrwa Wibawa. 1994:21).

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerjakan.

Sedangkan dalam bentuk variabel lainnya menurut Grindle adalah lingkungan atau konteks implementasi dari sebuah program. Adapun indikator yang berpengaruh dalam lingkungan kebijakan adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Agustino (2006:153). Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. *Pertama*, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai. *Kedua*, adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan yang dapat menjadi pelaksanaan yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. “Tepat” *ketiga* adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal.

Pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. *Keempat* adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yang merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang lebih dekat.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* atau persepsi publik akan kebijakan dan pelaksana kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan pelaksana

kebijakan, dan *individualis* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasikan kebijakan. Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan yaitu dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis.

## B. Kerangka Pikir

**Gambar I: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

## C. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut: diduga masih banyak kendala dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

#### **D. Konsep Operasional**

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system

## E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan dengan enam indikator, maka dilakukan pendefenisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

**Tabel I: Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Usman, 2002:70)	Pelaksanaan Subsidi RASTRA	1. Tepat sasaran	- Adanya ketepatan sasaran program - Adanya pemahaman pengetahuan dan keterampilan
		2. Tepat jumlah	- Adanya ketepatan jumlah pagu beras yang diberikan - Adanya perbedaan ketepatan jumlah pagu beras yang diberikan
		3. Tepat harga	- Adanya ketepatan harga yang diberikan

			- Adanya perbedaan ketepatan harga yang diberikan
		4. Tepat waktu	- Adanya ketepatan waktu dalam pendistribusian pelaksanaan - Adanya perbedaan dalam ketepatan waktu pendistribusian pelaksanaan
		5. Tepat kualitas	- Adanya ketepatan kualitas beras yang diberikan - Adanya perbedaan ketepatan kualitas beras yang diberikan
		6. Tepat administrasi	- Prosedur administrasi yang benar, lengkap dan tepat waktu - Adanya ketidaktepatan terkait dengan administrasi yang benar, lengkap dan tepat waktu

Sumber : Modifikasi penelitian, 2020

## F. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) tersebut dapat dikatakan:

a. Tepat sasaran:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

b. Tepat jumlah:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

c. Tepat harga:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

d. Tepat waktu:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq$  1%-33%.

e. Tepat kualitas:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq$  67%-100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq$  1%-33%.

f. Tepat administrasi:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq$  67%-100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq$  1%-33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

Baik : Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat administrasi adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq$  67%-100%.

Cukup baik : Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat administrasi adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat administrasi adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Menurut Sugiyono (2018:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalasi*.

Djam'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian sengaja diambil di Desa Tenganau. Alasannya dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) ini disalurkan kepada masyarakat atau Keluarga pra sejahtera yang ada di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

## C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Sugiono, 2010:90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiono, 2010:91). Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

NO	Sub Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	100%
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1	1	100%
3	Pendamping Sosial Rastra	8	2	25%
4	Masyarakat Penerima Rastra	133	82	5%
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>	<b>86</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data Olahan 2019*

#### D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010: 183).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2015: 225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:6) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berikut:

1. Kuisisioner

Kuesioner, Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuesioner yang diajukan dan diisi oleh para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Moleong (2011:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Miles & Huberman (2014:17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,

menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

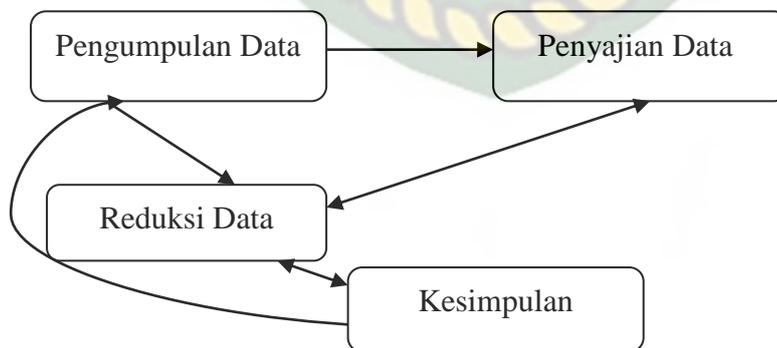
c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar3.1 Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman (2014)

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Bengkalis yang berada di Pulau Bengkalis, terpisah dari Pulau Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 11.481,77 Km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 26 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sejumlah 658.034 jiwa. Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2° 30' Lintang Utara - 0° 17' Lintang Utara dan 100° 52' Bujur Timur – 102° 10' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

1. Sebelah Utara :berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kabupaten Siak.
3. Sebelah Barat :berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah Timur :berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan (Www. bengalis. co.id diakses tanggal 02 November 2020)

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut, dengan temperatur 26°C–32°C. Musim hujan terjadi sekitar bulan September–Januari dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Bengkalis merupakan daerah yang terdiri dari dataran-dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,1 m di atas permukaan laut. Di daerah ini

juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau), serta 26 Pulau besar dan kecil. Pulau-Pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km<sup>2</sup>), Pula Tebing Tinggi (1.436,83 km<sup>2</sup>), Pulau Bengkalis (938,40 km<sup>2</sup>), Pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>).

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat Berlokasi di Selat Malaka dan merupakan pantai kebanggaan dari 3 daerah di Pulau Rupat, yaitu Tanjung Medang, Tanjung Rhu, dan Tanjung Punak. Tempat ini dapat dicapai dengan boat kecil yang dikenal dengan nama 'pompong' dari Dumai. Perjalanan akan memakan waktu selama 15 menit dengan boat dan 45 menit dengan kendaraan beroda dua (ojek). Jalur ini dilalui oleh boat nasional dan pengunjung internasional karena keindahan pantai Rupat dan pemandangan laut yang nyaman. Rencananya akan dibangun jembatan sepanjang 50 km untuk menghubungkan pulau ini dengan Malaka – Malaysia. Di pulau Rupat juga dapat ditemukan komunitas suku terbelakang yang disebut dengan suku Akit yang melakukan berbagai atraksi untuk menghibur pengunjung.

Sarana perhubungan di Kabupaten Bengkalis untuk perhubungan darat jalan di Kabupaten Bengkalis sepanjang 1.132.574 km yang 47,63% permukaannya masih tanah. Kabupaten Bengkalis sebagian besar wilayahnya adalah laut terutama di pesisir Timur daerah Sumatera, untuk itu perhubungan laut sangat penting di Bengkalis. Oleh karena itu di Kabupaten Bengkalis dibangun

pelabuhan, jumlah barang dalam negeri dan luar negeri yang dibongkar pada pelabuhan tercatat sebanyak 5.497.735 ton dan 1.472.409 ton. Disamping itu, jumlah barang dalam negeri dan luar negeri yang dimuat sebanyak 3.005.203 ton dan 1.036.584 ton.

## **B. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis**

### **1. Visi Kabupaten Bengkalis**

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”

### **2. Misi Kabupaten Bengkalis**

Pertama. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas. Kedua. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat. Dan Ketiga. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni:

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat Pemerintahan, pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
2. Gerbang Laksmana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius,

Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan perternakan modern yang pro rakyat.

3. Gerbang Permata. Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. (Dokumen Bagian Humas Kabupaten Bengkalis)

### **C. Gambaran Umum Kecamatan Pinggir**

Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir diresmikan tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2003. Sebelum menjadi kecamatan pusat pemerintahan terletak di Duri, berdasarkan PP No.129 Tahun 2000 ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukanya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Pinggir membuka lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Siak Kecil yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau. Secara geografis, kecamatan pinggir berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan kecamatan Bukit Batu
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah timur dengan Kabupaten Siak
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Mandau

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Pinggir adalah 2503 KM<sup>2</sup> dengan desa terluas adalah desa Muara Basung seluas 378,00 atau sebesar 15,10 % dari luas Kecamatan Pinggir keseluruhanya. Secara geografis Kecamatan Pinggir terletak antara 100 ° 01'10"11,0" Lintang Utara sampai 1°15'07,5" Bujur Timur.

Kecamatan pinggir melakukan pemekaran desa pada tahun 2014 sebanyak 6 desa yaitu Desa Buluh Apo, Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa

Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Pinggir terdiri dari 17 desa dan 2 kelurahan, sehingga menjadi 19 Desa/Kelurahan dengan ibu kota kecamatan terletak di Pinggir.

**Tabel IV.1**  
**Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1	Kelurahan Balai Raja	46 KM
2	Kelurahan Titian Antui	37 KM
3	Desa Pinggir	287 KM
4	Desa Muara Basung	378 KM
5	Desa Beringin	250 KM
6	Desa Balai Pungut	180 KM
7	Desa Melibur	245 KM
8	Desa Kuala Penaso	139 KM
9	Desa Semunai	220 KM
10	Desa Tenggana	260 KM
11	Desa Serai Wangi	01 KM
12	Desa Tasik Serai	370 KM
13	Desa Tasik Serai Timur	90 KM
14	Desa Buluh Apo	-
15	Desa Sungai Meranti	-
16	Desa Pangkalan Libut	-
17	Desa Tasik Serai Barat	-
18	Desa Tasik Tebing Serai	-
19	Desa Koto Pait Beringin	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2503 KM<sup>2</sup></b>

**Sumber Data :** Monografi Kecamatan Pinggir

## 2. Kondisi Geografis

Sebagian wilayah yang terdiri dari dataran rendah yang ketinggiannya berada rata-rata antara 0-25 M di atas permukaan laut. Daerah Kecamatan Pinggir beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 31 0c dan suhu minimum 25 0c jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak di Kecamatan Pinggir 145 hari dengan banyaknya curah hujan sebesar 2,760 M2/th. Bentuk wilayah Kecamatan

Pinggir datar sampai berombak sebanyak 86 % berombak sampai berbukit sebanyak 14 %.

Kecamatan pinggir sebagai daerah yang memiliki peranan penting untuk dapat ikut serta menunjang pertumbuhan serta pengembangan daerah, dalam industri yang sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah serta potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini. Selanjutnya memberikan suatu pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, terutama sekali adalah adanya suatu perkembangan ekonomi daerah-daerah atau desa yang mengikuti gerak perekonomian Kecamatan Pinggir.

### **3. Keadaan Penduduk Serta Perkembangannya**

Kecamatan Pinggir yang mempunyai luas wilayah lebih kurang 2503 KM<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk sebanyak 86.027 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 44.845 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 41.182 orang. Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha untuk membangun perekonomian, dengan demikian masalah penduduk sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sumber utama terciptanya tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dalam perekonomian suatu bangsa. Untuk mendorong percepatan gerak pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang terdapat pada sektor-sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa-jasa perhubungan, dan hasil-hasil hutan dari daerah sekitar Kecamatan Pinggir.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pinggir adalah dibidang perekebunan sebanyak 60,49 % dan dibidang pertanian sebesar 16,80 % dan mata pencaharian terendah dibidang kehutanan, dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet penduduk Kecamatan Pinggir mampu mencukupi kebutuhan kehidupan dan pendapatan perkapita. Mayoritas penduduk di Kecamatan Pinggir memeluk agama islam, namun ada juga yang memeluk agama lain. Bahwa jumlah penduduk pemeluk agama islam sebanyak 60.154 di ikuti dengan pemeluk agama Kristen protestan sebanyak 23.148 hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman dan kehidupan sosial yang merata di Kecamatan Pinggir.

#### **4. Ekonomi dan Pendidikan**

Pada dasarnya Kecamatan Pinggir yang mempunyai kedudukan wilayah strategis merupakan salah satu sumber pendapatan perekonomian yang besar untuk kabupaten bengkalis, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaanperusahaan industri yang berdiri dan mengelolah sumber daya alam yang ada di kecamatan pinggir, juga potensi perkebunan kelapa sawit yang merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pinggir yang menunjang perekonomian serta pendapatan daerah tersebut. Mata pencaharian yang lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI, Buruh atau jasa, perdagangan dan lain-lain.

Sementara itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam gerak pembangunan dan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan akan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dalam bidang pendidikan, di Kecamatan Pinggir dapat dikatakan

cukup mulai dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tingkat atas baik negeri ataupun swasta, dan jumlah penduduk menurut pendidikan juga sudah ada beberapa yang mendapatkan gelar sarjana, dengan adanya fasilitas ini akan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi Kecamatan Pinggir.

Banyaknya perusahaan yang berada di Kecamatan Pinggir menunjukkan daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat membantu untuk menunjang kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hampir dari semua perusahaan yang ada bergerak dalam industri pengolahan minyak, baik itu minyak mentah dari hasil pengeboran maupun sumber minyak dari hasil perkebunan kelapa sawit.

#### **D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbag Penyusunan Program
  - b) Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
  - c) Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
  - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
  - c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
  - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
- a) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
  - b) Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
  - c) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  - b) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
  - c) Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- a) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.**

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

## **2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis**

Tugas Sekretaris:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

## **3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dan fungsi ;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 5) Pelaksanaannorma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas dan fungsi ;

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ? undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas luar panti dan/atau lembaga. Untuk

dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;

- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia luar panti dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 6) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 7) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 8) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau Lembaga;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas dan fungsi;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ? undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun

#### **6. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas dan fungsi;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- 5) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- 6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

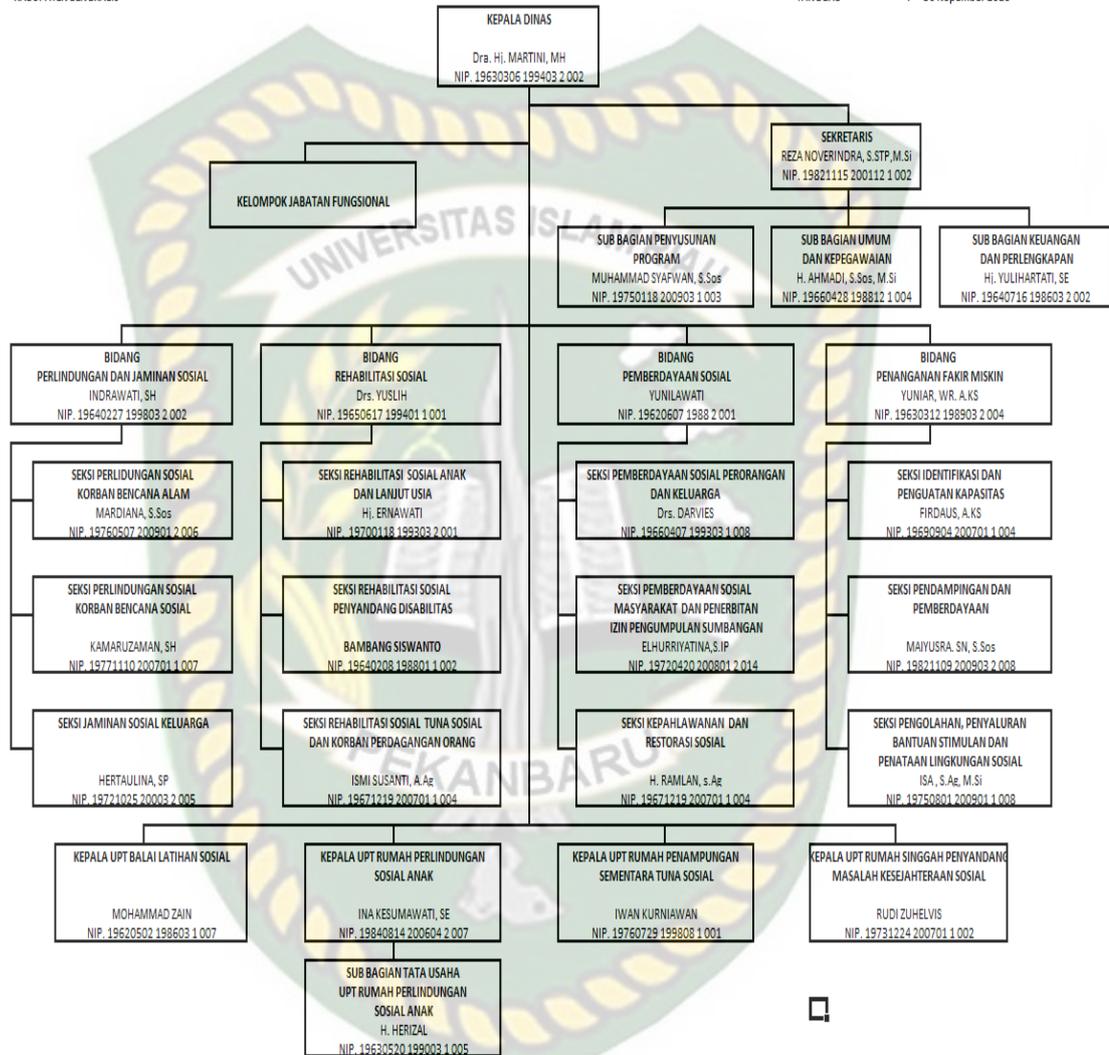
Gambaran secara umum Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut :

# Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
DINAS SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 42 Tahun 2016  
TANGGAL : 30 Nopember 2016



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum Penelitian ini di jelaskan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas responden. Responden disini adalah orang-orang yang dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat sangat bermanfaat dalam penelitian, pendidikan dan tingkat umur. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis menggunakan identitas responden dari:

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya satu golongan yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk memberi tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table V.1. Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Laki- laki	69	84.15
2	Perempuann	13	15.85
Jumlah		82	100

Sumber : Data Olahan penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 69 orang (84.15%). Sedangkan responden perempuan sebanyak 13 orang (15.85%), hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki berdominan di banding dengan perempuan.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.2: Tingkat pendidikan Responden**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SLTP	24	29.27
3	SLTA	43	52.44
4	Diploma	15	18.29
Jumlah		82	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan dimayoritas tingkat SLTA/SMA sebanyak 43 orang (52.44%), SLTP/SMP sebanyak 24 orang (29.27%) dan tingkat DIPLOMA/S1 sebanyak 15 orang (18.29%) sedangkan tingkat SD tidak ada.

## 3. Tingkat Umur atau Usia

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang menulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabal V.3: Tingkat Umur Responden**

No	Tingkat Umur	Jumlah orang	Persentase (%)
1	21-30 Tahun	41	50.00
2	31- 40 Tahun	32	39.02
3	41- Tahun ke atas	9	10.98
Jumlah		82	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden pada penelitian ini yang paling banyak adalah responden yang berumur 21-30 Tahun sebanyak 41 orang (50.00%). Sedangkan tingkat umur paling rendah responden yang berumur 41 Tahun ke atas sebanyak 9 orang (10.98%). Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 Tahun sebesar 50%.

**B. Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Rastra) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Rastra.

Pada waktu terjadi krisis pangan tahun 1998 program ini pun dimulai dan untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan yaitu memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam belas) tahun, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin. untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar.

Sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pangan merupakan hak yang mendasar

bagi pemerintah untuk wajib memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (bps, 2018). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar didunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Program raskin pada bulan September 2015 telah di ganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Penyaluran rastra ini merujuk pada Surat Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 Dengan Perihal Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Penetapan anggaran subsidi beras yang merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota

diseluruh indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam Negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Untuk itu perlu dilakukan penjabaran mengenai tanggapan responden berdasarkan pada indikator penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**a. Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastradan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.4 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Adanya ketepatan sasaran program	25	42	15	82
2	Adanya pemahaman pengetahuan dan keterampilan	31	34	17	82
	Jumlah	56	76	36	246
	Rata-rata	28	38	18	82
	Persentase	22.7	30.8	10.5	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 22.7% responden menyatakan bahwa Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terbaik, 30.8% responden menyatakan bahwa Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah Cukup Baik, 10.5% responden menyatakan bahwa Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Cukup Baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat sasaran Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Cukup Baik.

Pada umumnya Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan, Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan Tidak Baik dan Cukup Baik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu denga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*“Sudah, sudah semua kita salurkan dan lakukan dan tepat sasaran sebagaimana kebijakannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, serta dalam pembagian sudah kita berikan kepada staff yang lebih memahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini”.*

Sejalan menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*“Sebisanya kita usahakan agar dapat tersalurkan sesuai dengan harapan khalayak ramai, keberhasilan pelaksanaan salah satunya adalah dengan memiliki staff/ kinerja di bidangnya seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat diandalkan”.*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Sasaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Kita selalu memberikan program ini adalah untuk membantu masyarakat yang merasa kesulitan di bidang pangan yaitu beras, hal ini merupakan upaya yang setiap tahunnya diharapkan dapat terus tersalurkan kepada yang membutuhkannya. Kita staff yang ditugaskan sebagai pendamping merasa sangat bangga di ikut sertakan ke dalam program ini, sebisanya kita akan memberikan yang terbaik selaku pendamping untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat agar tersalurkan dengan baik”.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Sosial bagian Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis selalu melakukan tepat sasaran dalam penyaluran Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdi Kabupaten Bengkalis. Tujuannya adalah agar masyarakat yang yang berpendapatan rendah terbantu dengan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pihak yang memiliki kewenangan (melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis) harus bisa lebih tepat dalam meningkatkan Kreatifitas Kinerja dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis.

**b. Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastra dan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.5 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Adanya ketepatan jumlah pagu beras yang diberikan	10	72	0	82
2	Adanya perbedaan ketepatan jumlah pagu beras yang diberikan	21	53	8	82
	Jumlah	31	125	8	164
	Rata-rata	16	63	4	82
	Persentase	18.9	76.2	4.9	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 16 responden atau 18.9% menyatakan bahwa Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan

Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah baik, 76.2% responden menyatakan bahwa Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. 4.9% responden menyatakan bahwa Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak Baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Cukup Baik.

Pada umumnya Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun untuk lebih memaksimalkan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka harus dilakukan Perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada di indikator Tepat Jumlah dengan tidak baik dan cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut, hal yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pihak yang memiliki kewenangan adalah Dinas Sosial di

Kabupaten Bengkalis harus bisa lebih memperhatikan Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Kurangnya indikator Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dikarenakan banyak hal yang menjadi faktor penghambatnya, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*“Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah dikarenakan adanya jumlah pembeda antara masyarakat yang Berpendapatan Rendah dengan jumlah pagu beras yang ada, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang nyatanya memiliki ekonomi menengah namun tetap membutuhkan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) dengan berbagai alasan, jadi kita harus bisa selektif dalam milihan mana yang memang harus lebih dulu membutuhkan”.*

Sejalan menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*“Kita harapkan hambatan terkait dengan jumlah pagu beras yang disalurkan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan ini menjadi pembelajaran agar kedepannya lebih selektif lagi, yang mana kita ketahui bahwa masyarakat yang berada di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis ini tergolong masyarakat yang ekonomi dan penghasilannya bersumber dari petani dan nelayan”.*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Setiap pelaksanaan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang ada, ada hambatan antara sesama masyarakat seperti timbulnya rasa kecewa dan iri hati antar sesama masyarakat dikarenakan ada yang tidak mendapatkan Subsidi Berasada juga pendapat masyarakat yang lebih memilih untuk ditukar dengan besar yang lebih efektif dikarenakan ingin memiliki beras Subsidi tersebut. Begitu banyak perbedaan dan hambatan yang timbul dimasyarakat, namun tidak menyudut Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bagian Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan tepat jumlah dalam penyaluran Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah jangan dilakukan dengan setengah-tengah, pemerintah harus selektif lagi dalam menangani masalah yang terkait dengan tepat jumlah dalam penyaluran”.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bagian Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya sudah tepat jumlah karena selalu melihat jalannya penyaluran Subsidi Beras Sejahtera sampai kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tepat Jumlah dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik.

**c. Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastra dan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.6 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Adanya ketepatan harga yang diberikan	66	16	0	82
2	Adanya perbedaan ketepatan harga yang diberikan	52	7	23	82
	Jumlah	118	23	23	164
	Rata-rata	59	12	12	82
	Persentase	72.0	14.0	14.0	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 72% responden menyatakan bahwa tepat harga sudah baik, 14% responden

menyatakan bahwa Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tengganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, 14% responden menyatakan bahwa Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tengganau Kabupaten Bengkalis tidak baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Baik.

Kondisi terkait pandangan (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka penulis mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*“Sekarang program ini di peruntukan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah jadi pengaturan terbarunya juga tidak dibayar ini berlakunya setelah tahun 2018 dulunya untuk mendapatkan penyaluran beras subsidi ini dibayar hanya saja dengan jumlah yang kecil dan tidak memberatkan masyarakat untuk mendapatkannya dulu masyarakat harus bayar tebusan perkilo untuk mendapatkannya sekarang tidak lagi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“Banyak bantuan yang bersumber dari Pemerintah yang diperuntukan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah mulai dari PKH (Program Penerima Harapan), dan banyak lagi salah satu adanya program ini ada untuk meretas kemiskinan di Negara ini, seharusnya masyarakat dapat menyokong program-program yang ada ini untuk saling menjaga dan*

*memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia, jagan saling mengusik semuanya kita harapkan kebagian karena program ini akan terus diterapkan Pemerintah untuk Rakyat Indonesia”.*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis di dukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Subsidi Beras ini bersipat gratis dari Pemerintah, dan kalaupun kita menemukan masyarakat yang menyatakan dibayar dengan uang, tanya lagi bisa jadi dia mendapatkan beras subsidi tersebut dari pihak mana, karena masyarakat yang saya tau ada dijual kembali beras tersebut kepada orang yang memang ingin atau mau beras tersebut dapat ditukar dengan uang dan dijual kembali atau dengan ditukar antara beras yang bersumber dari subsidi kepada yang non subsidi”.*

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bagian Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai usaha yang ada meskipun banyak permasalahan yang ada di lapangan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan jajarannya membantu memecahkan masalah dan bagi masyarakat penerima Rastra dengan adanya program tersebut sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada umumnya Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah Cukup baik. Namun masih perluh dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator tersebut dengan jawaban yang cukup baik dan tidak baik. Berdasarkan hal tersebut

hal yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku Dinas Sosial pihak yang memiliki kewenangan harus bisa lebih melaksanakan penertiban dalam melaksanakan tugasnya dalam Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tepat Harga dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik.

**d. Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastra dan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.7: Tanggapan Responden terhadap Indikator Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Adanya ketepatan waktu dalam	18	60	4	82

	pendistribusian pelaksanaan				
2	Adanya perbedaan dalam ketepatan waktu pendistribusian pelaksanaan	14	42	26	82
	Jumlah	32	102	30	164
	Rata-rata	16	51	15	82
	Persentase	19.5	62.2	18.3	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 19.5% responden menyatakan bahwa Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah baik, 62.2% responden menyatakan bahwa Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, 18.3% responden menyatakan bahwa Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis tidak baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Cukup Baik.

Kondisi terkait pandangan (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra)

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka penulis mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*”Dulunya Rastra ini tersalurkan kepada masyarakat yang Berpendapatan Rendah setiap bulan pada tanggal 25, tapi sekarang untuk menyesuaikan program yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah seperti KPM dan PKH jadi banyak perubahan dan pembaharuan dari pihak pihak atasan”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya perubahan waktu dan tanggal dalam penyaluran Rastra menjadikan Strategi baru bagi kita untuk lebih baik lagi dan dapat bersaing dengan kemunculan program-program yang baru”.*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Bagi kita pendamping dengan adanya perubahan yang biasanya tepat waktu dalam penyaluran Rastra menjadi tantangan tersendiri bagi kita, mudah-mudahan dengan disesuaikan program penyaluran ini menjadi lebih baik lagi kedepannya”.*

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bagian Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai usaha yang ada meskipun banyak permasalahan yang ada di lapangan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan jajarannya membantu memecahkan masalah dan bagi masyarakat penerima Rastra dengan adanya program tersebut sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan, kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun masih perlu beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator Tepat Waktu dengan tidak baik dan cukup baik berarti disitu masih ada beberapa perbaikan tentang Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik.

**e. Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastra dan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.8: Tanggapan Responden terhadap Indikator Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Adanya ketepatan kualitas beras yang diberikan	10	72	0	82
2	Adanya perbedaan ketepatan kualitas beras yang diberikan	13	69	0	82
	Jumlah	23	141	0	164
	Rata-rata	12	71	0	82
	Persentase	14.0	86.0	0.0	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 14.0% responden menyatakan bahwa Tepat Kualitas sudah baik, 86.0% responden menyatakan bahwa Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, 0% responden menyatakan bahwa Tepat Kualitas dalam

Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis tidak baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Cukup Baik.

Kondisi terkait pandangan (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka penulis mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*"Kualitas beras yang kita berikan merupakan dari pihak atasan langsung salah satu contoh beras yang dijadikan Rastra adalah beras denga merk Beras Kita( Beras Keluarga Indonesia), ada juga terobosan baru dari bulog seperti Beras Kita Kemasan 200 kg yang biasa disebut "Beras Sachet, beras anak daro "Beras Solok" menjadi salah satu beras yang disukai masyarakat."*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*"Masyarakat yang Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis tergolong cukup tinggi dari Desa lain yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini membuat Pihak kita harus benar-benar memperhatikan kualitas beras yang diberikan dan juga harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya, selain itu harus tepat sasaran juga sehingga begitu banyak upaya dan strategi agar dapat tersalurkan sesuai dengan harapan masyarakat banyak".*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Dari kita tim pendamping merangkap pengawas memiliki tugas untuk memantau agar beras yang dikirimkan ketempat warga itu tepat sasaran, adapun terkait dengan kualitas beras itu merupakan hak dari pihak atasan”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis. Dalam hal Tepat Kualitas selalu memberikan upaya yang terbaik agar Rastra dapat tersalurkan tepat sasaran kepada penerima.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya responsibilitas Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Namun masih perlu beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator Tepat Kualitas dengan tidak baik dan cukup baik berarti disitu masih ada beberapa perbaikan tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini harus mengharuskan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selaku pihak yang berwenang melalui Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin serta pendamping di Kabupaten Bengkalis harus bisa lebih meningkatkan Tepat Kualitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tepat Kaulitas dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik.

**f. Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Dalam penilaian Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada Masyarakat Penerima Rastra dan unsur Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**TabelV.9: Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Prosedur administrasi yang benar, lengkap dan tepat waktu	76	6	0	82
2	Adanya ketidaktepataan terkait dengan administrasi yang benar, lengkap dan tepat waktu	58	16	8	82
	Jumlah	134	22	8	164
	Rata-rata	67	11	4	82
	Persentase	81.7	13.4	4.9	100

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan bahwa 81.7% responden menyatakan bahwa Tepat Administrasi sudah baik, 13.4% responden menyatakan bahwa Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, 4.9% responden menyatakan bahwa Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis tidak baik.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek tepat administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berada pada kategori Baik.

Kondisi terkait pandangan (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tentang Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka penulis mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan:

*"Kita ada prosedur tersendiri yang memang harus dimiliki setiap pemerintah, misalnya yang berhak mendapatkan Rastra harus masyarakat yang berpendapatan rendah selebihnya tidak boleh di salurkan atau di berikan kepada masyarakat yang ekonominya kelas atas. Masalah waktu terkait dengan tepat waktu dalam penyaluran Rastranya itu merupakan keadaan yang memang tidak dapat untuk kita putuskan, terkadang*

*terkendalanya pada jarak tempuh atau hal-hal yang memang diluar batas kemampuan pegawai/ staff lapangannya”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“Pastinya ada Prosedur dari Pemerintah atasan kepada Pemerintah Daerah dalam ini, anggap saja beras sekian dan masyarakat yang mengaku berpendapatan rendah itu lebih tinggi, prosedur adalah untuk mengatasi hal-hal demikian agar tersalurkan ketangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan”.*

Pernyataan Informan diatas terkait dengan Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis didukung oleh hasil wawancara peneliti kepada Pendamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis:

*“Selaku pihak pendamping itu memberikan dan menyampaikan tepat waktu kepada masyarakat dan terkait dengan prosedur admnistrasinya siapa yang berhak dan tidak itu merupakan aturan yang telah diberikan dan ditetapkan oleh pihak atasan, jadi tugas kita hanya menyampaikan Rastra kepada masyarakat yang berhak tadi, yang dari pihak atasan tersebut”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis. Dalam hal Tepat Administrasi selalu memberikan upaya yang terbaik agar Rastra dapat tersalurkan tepat sasaran kepada penerima. Dalam proses ini keberhasilan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dilihat dari tujuan kebijakan Rastra yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Kriteria tepat Administrasi secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan administrasi termasuk kedalam prosedur ketepatan dalam menyalurkan Rastra kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tepat Administrasi dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik.

**g. Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**

Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap variabel Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut:

**Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Tepat sasaran	28	38	18	82
		22.7%	30.8%	10.5%	100%
2	Tepat jumlah	16	63	4	82
		18.9%	76.2%	4.9%	100%
3	Tepat harga	59	12	12	82
		72.0%	14.0%	14.0%	100%
4	Tepat waktu	16	51	15	82
		19.5%	62.2%	18.3%	100%
5	Tepat kualitas	12	71	0	82
		14.0%	86.0%	0.0%	100%
6	Tepat administrasi	67	11	4	82
		81.7%	13.4%	4.9%	100%
Jumlah		198	246	53	492
Persentase		40.24	50.0	10.77	100%

Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pilihan responden terhadap semua indikator pada Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, maka didapatkan bahwa 40.24% responden menjawab bahwa Tepat sasaran tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, 50.0% responden menjawab bahwa Tepat Jumlah tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan cukup baik, dan 10.77% responden menjawab Pelaksanaan Subsidi Beras

Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis dengan tidak baik.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa tentang Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, dengan 40.24% responden menyatakan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial di bagian Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Kabupaten Bengkalis serta Penamping Sosial Rastra di Kabupaten Bengkalis yang ikut berperan penting dalam pelaksanaan Rastra dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis masih perlu dilakukan perbaikan.

### **C. Hambatan dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisiner maka dapat dikatakan bahwa hambatan Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis tersebut adalah:

1. Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan belum baik dilihat dalam penyaluran Rastra yaitu Masih adanya ketidak merataan dalam pelaksanaan pendistribusian Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diberikan, hal tersebut disebabkan karena pendistribusian Rastra melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Dalam masalah kejelasan penyaluran yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana atau implementator kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
2. Kurang konsistensi seharusnya pemerintah yang diberikan wewenang dalam melaksanakan suatu tugas haruslah konsisten dan jelas. Seperti halnya dalam penyaluran rastra kepada masyarakat yang berpendapatan rendah jelas hal ini menjadikan implementator tidak konsten dengan kebijakan yang dibuat.
3. Kurangnya sumberdaya yang belum memadai baik sarana pendukung maupun sumberdaya manusia sebagai pengelola dan pelaksana rastra di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas fisik sebagai sarana prasarana pendukung kebijakan seperti halnya armada oprasional pengangkut distribusi rastra yang masih menjadi faktor penghambat pendistribusian rastra.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan sara-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yaitu berada pada kategori Cukup Baik. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir sesuai dengan ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan Adminitrasi Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra).
2. Faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Masih adanya ketidak merataan dalam pelaksanaan pendistribusian Rastra bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diberikan, hal tersebut disebabkan karena pendistribusian Rastra melalui beberapa tingkatan birokrasi.

- b. Kurang konsistensi dalam penyaluran Rastra kepada masyarakat yang berpendapatan rendah di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis.
- c. Kurangnya sumberdaya yang belum memadai baik sarana pendukung maupun sumberdaya manusia sebagai pengelola dan pelaksana rastra di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis harus giat lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang terpilih (masyarakat berpendapatan rendah) sebagai penerima Rastra.
2. Sebagaikanya lebih konsistensi dan jelas lagi selaku pemerintah terkait dengan waktu penyaluran Rastra, Karena hal ini berdampak bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ada di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis.
3. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana pendukung sebagai pengelola dan pelaksana rastra, diharapkan masyarakat memiliki inisiatif untuk mencari jalan bagi kelancaran dalam Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevannya Dalam Pembangunan*. Ujung Padang: Persadi
- Abdullah M. Syukur. 1986. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*. Jakarta: P4N
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Afrianto, Dedy. 2016. Efektivitas raskin rendah, pemerintah lakukan evaluasi total di 2017. Okezone.com.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press. Buchari
- Djam’an Satori & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta
- Deliar Noer. 1995. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali
- Eddy Wibowo. 2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hikmat, H. 2017. Pengelolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang Lebih Berkualitas. Disampaikan pada Seminar Budget Day. Jakarta

- Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras  
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang  
Penepatan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
- Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pedoman Umum “Bantuan  
Sosial Beras Sejahtera
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan  
Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP  
YKPN
- Moris and Zulkifli. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan  
Tujuh Publishing
- Moleong, L. 1995. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miles, M. B, dan A. M. Herman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep  
Rohidi. Jakarta: Ui Pres
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT  
Remaja Rosdakarya
- P.Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: BumiAksara
- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEDUM Subsidi Beras bagi  
masyarakat berpendapatan rendah.
- Romli, O. 2017. Implementasi program beras miskin (raskin) di Desa Saketi  
Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. *Kajian Administrasi dan  
Pemerintahan Daerah*. 10 (06), 87-97.
- Suparlan P. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samodrwa Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta:  
Intermedia
- Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.  
Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiarti, Y. 2014. *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindakan  
Kejahatan*. Jendela Hukum

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli dan Moris A. Yogia. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Www. bengkalis. co.id diakses tanggal 02 November 2020

